



Pengaruh Kebijakan Belanja Daerah terhadap Efektivitas Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu

Akhmad Sugandi, Hery Nariyah, Nursahidin

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

akuakhmad@gmail.com, hery.nariyah@ugj.ac.id, nursahidin.sirod@ugj.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: kebijakan belanja daerah, ekonomi, regresi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan belanja daerah terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu. Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, kebijakan belanja daerah menjadi instrumen vital untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendukung sektor-sektor strategis. Dengan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi sederhana, data penelitian diambil dari Badan Pusat Statistik dan laporan keuangan daerah 2014-2023. Tujuan utamanya adalah menilai sejauh mana kebijakan belanja daerah meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan belanja daerah berdampak positif signifikan terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi meski pengaruhnya bervariasi menurut sektor strategis. Disarankan fokus kebijakan belanja pada investasi infrastruktur dan sektor produktif untuk hasil optimal.

Keywords: *regional spending policies, economy, regression*

ABSTRACT

This study examines the impact of regional spending policies on GDP and economic growth in Indramayu Regency. The background of this research is rooted in the importance of the local government's role in budget management to stimulate local economic growth. In the context of sustainable development, regional spending policies serve as a vital instrument for creating jobs, improving infrastructure quality, and supporting strategic sectors. Using a quantitative approach and simple regression analysis, the research data was obtained from the Central Statistics Agency and regional financial reports from 2014 to 2023. The main objective is to assess the extent to which regional spending policies enhance GDP and economic growth. The analysis results indicate that regional spending has a significant positive impact on GDP and economic growth. Increased spending has proven to stimulate economic growth, although its effects vary by strategic sector. It is recommended that spending policies focus on infrastructure investment and productive sectors for optimal results.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mencerminkan tingkat kemajuan dan kapasitas daerah dalam memanfaatkan sumber daya lokal demi kesejahteraan masyarakat (Hasan & Azis, 2018). Kabupaten Indramayu, di Jawa Barat, menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks meskipun memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri. Tantangan seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran tinggi, serta infrastruktur yang terbatas menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu menggunakan kebijakan belanja daerah sebagai instrumen strategis guna meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi global yang berpengaruh pada perekonomian lokal. Isu-isu seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan krisis ekonomi global dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan belanja. Misalnya, kenaikan harga bahan baku akibat ketidakstabilan pasar internasional dapat meningkatkan biaya proyek infrastruktur, yang pada gilirannya dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain yang juga penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, globalisasi mempengaruhi arus investasi dan perdagangan, yang dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja pada sektor-sektor yang mendukung daya saing, seperti pendidikan dan teknologi. Dengan demikian, kebijakan belanja daerah harus adaptif terhadap dinamika ekonomi global agar dapat memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

Belanja daerah, dalam kerangka otonomi yang diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Muin, 2014); (Indonesia, 2004), memungkinkan pemerintah lokal mendesain kebijakan sesuai karakteristik wilayahnya. Dalam konteks ini, belanja daerah Kabupaten Indramayu difokuskan pada investasi sektor produktif seperti infrastruktur dan layanan publik. Namun, meski alokasi anggaran telah dilakukan, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu selama 2021-2023 hanya 3,82 persen, di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 4,65 persen. Disparitas ini mengindikasikan perlunya optimalisasi anggaran belanja agar target pertumbuhan yang lebih inklusif dapat tercapai.

Kebijakan belanja daerah mempengaruhi PDRB dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. **Investasi Infrastruktur:** Pengeluaran untuk infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya memfasilitasi aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
2. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:** Belanja daerah yang diarahkan untuk meningkatkan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Masyarakat yang sehat dan terdidik lebih mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
3. **Stimulasi Permintaan Domestik:** Kebijakan belanja daerah yang agresif dapat meningkatkan permintaan domestik, karena peningkatan pengeluaran pemerintah dapat

Pengaruh Kebijakan Belanja Daerah terhadap Efektivitas Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu

mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini menciptakan efek multiplier yang positif bagi perekonomian lokal.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif dan analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan belanja daerah tidak hanya berdampak pada PDRB, tetapi juga pada aspek kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengintegrasikan analisis kualitatif melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan, memberikan perspektif praktis yang sering kali kurang diperhatikan dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Nugroho, 2020), lebih fokus pada analisis teoritis tentang kebijakan publik tanpa mengaitkannya langsung dengan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengaitkan kebijakan belanja daerah secara langsung dengan hasil nyata di lapangan, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan belanja daerah terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu. Kebijakan ini diyakini berdampak signifikan terhadap dinamika ekonomi lokal melalui alokasi yang tepat, seperti pada infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan daya saing daerah. Secara teoritis, belanja daerah mempengaruhi ekonomi secara langsung melalui proyek pembangunan fisik dan tidak langsung, yaitu melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peluang kerja.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan evaluasi empiris terhadap efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indramayu, menawarkan sumbangan pemikiran bagi literatur administrasi publik dan kebijakan pembangunan daerah, serta menyediakan rekomendasi praktis bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan ke depan.

Kajian Teori

Dunn (2015) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas suatu kebijakan publik, yaitu Efektivitas (*Effectiveness*), Efisiensi (*Efficiency*), Kecukupan (*Adequacy*), Kesamaan atau Perataan (*Equity*), Responsivitas (*Responsiveness*), Ketepatan (*Appropriateness*).

Nugroho (2023) memperluas konsep evaluasi kebijakan dengan menambahkan lima dimensi yang mencakup tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Kajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

PDRB adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi ekonomi suatu wilayah (Alhudhori, 2017). PDRB dihitung berdasarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu, yang mana indikator ini mencakup berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan jasa. Peningkatan PDRB umumnya dianggap sebagai tanda kemajuan ekonomi, menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan berhasil mendorong produktivitas daerah.

LPE mengukur persentase perubahan PDRB dari periode ke periode dan sering digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang berhasil akan meningkatkan LPE, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, penurunan pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, peningkatan PDRB dan LPE dapat menjadi indikator efektivitas kebijakan ekonomi daerah, yang mencakup alokasi anggaran yang tepat dan distribusi manfaat yang merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode verifikatif untuk menguji pengaruh belanja daerah terhadap PDRB dan LPE di Kabupaten Indramayu (Creswell & Creswell, 2017); (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis hubungan kausal berbasis data empiris, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh kebijakan belanja daerah terhadap perkembangan ekonomi lokal.

1. Desain dan Objek Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kausal komparatif untuk mengeksplorasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen guna mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang mendasari. Objek penelitian meliputi data belanja daerah, PDRB, dan LPE Kabupaten Indramayu selama periode 2014-2023, yang dikumpulkan dari publikasi resmi dan laporan instansi terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi serta data primer dari wawancara mendalam. Data sekunder mencakup publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi tentang alokasi belanja, PDRB, dan LPE. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, termasuk Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi BAPPEDA-Litbang Kabupaten Indramayu, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu, Statistisi Ahli Madya BPS, serta Ketua Tim Perhitungan PDRB BPS, guna memperkaya analisis kuantitatif dengan perspektif praktis dalam kebijakan ekonomi daerah.

3. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini mengoperasionalkan variabel utama dalam bentuk terukur untuk mendukung analisis berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan efektivitas kebijakan Riant D. Nugroho, sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah (Variabel Independen): Variabel ini meliputi anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, dinyatakan dalam satuan rupiah. Pengeluaran ini diasumsikan mendukung pembangunan dan memperkuat ekonomi lokal.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): Sebagai variabel dependen pertama, PDRB menunjukkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor

ekonomi di Kabupaten Indramayu dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan belanja pada produktivitas ekonomi.

- c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE): Variabel dependen kedua ini, diukur dalam persentase perubahan tahunan PDRB, merefleksikan tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum dan menjadi indikator efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Transformasi Variabel dan Spesifikasi Model

Penelitian ini melakukan transformasi variabel belanja daerah ke dalam dua bentuk: satuan absolut (rupiah) dan satuan persentase (%), untuk menjaga konsistensi dan memperoleh interpretasi yang lebih bermakna. Pendekatan ini mempertimbangkan relevansi satuan persentase dalam analisis LPE, sesuai teori ekonometrika yang dikemukakan oleh (Krugman et al., 1999) serta (Greene, 2001); (Gujarati, 2003). Transformasi ini dimaksudkan agar perubahan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat secara relatif, sehingga memberikan interpretasi yang lebih intuitif mengenai dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk mengevaluasi dampak langsung variabel independen terhadap variabel dependen, dengan bantuan aplikasi Eviews 12 Student Version Lite. Sebelum analisis regresi dilakukan, uji asumsi klasik diterapkan untuk memastikan model regresi memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Uji-uji tersebut meliputi:

- a. Uji Linearitas: Digunakan untuk memastikan adanya hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Uji linearitas ini mengandalkan test of linearity dengan signifikansi $\leq 0,05$, menunjukkan adanya hubungan linear antara belanja daerah dan variabel dependen.
- b. Uji Normalitas: Uji ini, yang menggunakan uji Jarque-Bera, memastikan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai signifikansi yang memenuhi kriteria menunjukkan distribusi normal residual, yang penting untuk keabsahan uji statistik lebih lanjut.
- c. Uji Heteroskedastisitas: Menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi perbedaan varians residual pada berbagai tingkat variabel independen. Apabila scatter plot residual menunjukkan pola acak, asumsi homoskedastisitas terpenuhi, mendukung akurasi prediksi model.
- d. Uji Autokorelasi: Uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam residual. Nilai yang mendekati 2 menandakan tidak adanya autokorelasi, yang penting dalam analisis data time series agar error terms antar observasi tidak saling berkaitan dan hasil regresi tetap valid.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji hipotesis dengan uji t dan uji F untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t mengevaluasi dampak signifikan dari setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, sedangkan uji F menilai pengaruh variabel independen secara keseluruhan. Tingkat

signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$; hasil dengan nilai $p < 0,05$ menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selain itu, penelitian menghitung koefisien determinasi (R^2) guna melihat sejauh mana variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 yang mendekati 1 menandakan kontribusi signifikan dari belanja daerah terhadap PDRB dan LPE, sementara nilai yang lebih rendah menunjukkan kontribusi yang lebih kecil. Melalui pendekatan verifikatif ini, penelitian bertujuan memberikan bukti empiris mengenai dampak kebijakan belanja daerah terhadap indikator ekonomi utama di Kabupaten Indramayu. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengevaluasi pengaruh belanja daerah terhadap PDRB dan LPE di Kabupaten Indramayu. Data penelitian mencakup belanja daerah serta indikator ekonomi selama periode 2014 hingga 2023, dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Analisis dilakukan melalui model regresi sederhana dengan pendekatan kuantitatif yang terverifikasi.

1. Hasil Analisis Regresi untuk PDRB dan LPE

Untuk mengevaluasi pengaruh belanja daerah terhadap PDRB dan LPE, model regresi sederhana digunakan sebagai alat utama analisis. Model ini dinilai sesuai untuk mengidentifikasi hubungan linier antara variabel independen (belanja daerah) dan variabel dependen (PDRB dan LPE) yang diukur setiap tahun.

2. Hasil Regresi Sederhana untuk PDRB:

Dependent Variable: PDRB
 Method: Least Squares
 Date: 07/15/24 Time: 21:12
 Sample: 2014 2023
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17412.21	19161.85	-0.908692	0.3901
BD	0.018741	0.005880	3.187429	0.0129

R-squared	0.559464	Mean dependent var	43358.26
Adjusted R-squared	0.504397	S.D. dependent var	8613.363
S.E. of regression	6063.727	Akaike info criterion	20.43489
Sum squared resid	2.94E+08	Schwarz criterion	20.49541
Log likelihood	-100.1745	Hannan-Quinn criter.	20.36851
F-statistic	10.15971	Durbin-Watson stat	0.639810
Prob(F-statistic)	0.012853		

Sumber: Hasil Output Eviews 12 Student Version Lite, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$PDRB = -17412,21 + 0.018741.BD$$

Dari hasil ini, diperoleh koefisien sebesar 0,018741 pada variabel belanja daerah (BD), yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam belanja daerah memiliki korelasi positif dengan peningkatan PDRB. Koefisien ini menunjukkan bahwa belanja daerah berperan dalam meningkatkan PDRB, sehingga lebih tinggi belanja daerah, maka semakin besar pula PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten Indramayu dalam periode penelitian ini.

3. Hasil Regresi Sederhana untuk LPE:

Dependent Variable: LPE
 Method: Least Squares
 Date: 07/23/24 Time: 09:06
 Sample: 2014 2023
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.130672	0.528678	5.921697	0.0004
LPBD	0.143207	0.047244	3.031254	0.0163
R-squared	0.534572	Mean dependent var		3.966000
Adjusted R-squared	0.476394	S.D. dependent var		1.971718
S.E. of regression	1.426747	Akaike info criterion		3.725528
Sum squared resid	16.28486	Schwarz criterion		3.786045
Log likelihood	-16.62764	Hannan-Quinn criter.		3.659141
F-statistic	9.188499	Durbin-Watson stat		2.347094
Prob(F-statistic)	0.016278			

Sumber: Hasil Output Eviews 12 Student Version Lite, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$LPE = 3,1306 + 0,1482.LPBD$$

Untuk LPE, hasil regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,1482 pada variabel independen laju pertumbuhan belanja daerah (LPBD). Ini berarti bahwa peningkatan sebesar 1% dalam belanja daerah akan berkontribusi pada kenaikan sebesar 0,1482% dalam LPE Kabupaten Indramayu. Meskipun pengaruhnya positif, nilai koefisien ini relatif lebih kecil dibandingkan pengaruh belanja daerah terhadap PDRB.

4. Koefisien Determinasi (R²) untuk PDRB dan LPE

Uji koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas dalam PDRB dan LPE yang dapat dijelaskan oleh belanja daerah sebagai variabel independen:

- **PDRB:** Nilai R² untuk model regresi PDRB adalah 0,559 atau 55,9%. Ini menunjukkan bahwa 55,9% variasi dalam PDRB dapat dijelaskan oleh perubahan dalam belanja daerah. Sementara 44,1% variasi dalam PDRB disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model yang digunakan.

- **LPE:** Untuk LPE, nilai R^2 tercatat sebesar 0,476 atau 47,6%. Ini mengindikasikan bahwa 47,6% variasi dalam LPE dipengaruhi oleh variabel belanja daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini.

5. Uji Signifikansi Model

Uji signifikansi regresi menunjukkan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kedua variabel dependen, PDRB dan LPE, pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien pada model regresi PDRB dan LPE masing-masing memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, yang menandakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kedua indikator ekonomi tersebut.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu

Analisis data menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah di Kabupaten Indramayu diimplementasikan melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja, yang berfokus pada pencapaian hasil dan efisiensi penggunaan sumber daya, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan peningkatan pelayanan publik. Selama periode 2014 hingga 2023, laju pertumbuhan belanja daerah menunjukkan fluktuasi sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan prioritas pembangunan. Misalnya, penurunan belanja pada 2018 menyesuaikan dengan tantangan ekonomi lokal, sementara peningkatan pada 2019 dan 2023 mencerminkan upaya konsolidasi fiskal dan adaptasi terhadap kebutuhan pembangunan baru seperti infrastruktur dan layanan dasar.

Pendekatan anggaran berbasis kinerja tercermin dalam alokasi anggaran yang memprioritaskan capaian yang konkret. Struktur ini membuat pengelolaan keuangan lebih akuntabel, dengan indikator kinerja dan target spesifik yang membantu evaluasi efektivitas program pembangunan. Analisis tahunan atas realisasi belanja menunjukkan tingkat pemanfaatan anggaran yang umumnya tinggi, tetapi masih ada tantangan dalam mencapai efisiensi optimal. Konsistensi antara alokasi dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun menandakan adanya upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kebijakan belanja daerah yang mendukung visi pembangunan Kabupaten Indramayu terlihat dari peningkatan anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini menunjukkan respons pemerintah terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat, dengan fokus pada kualitas hidup warga. Belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai dan subsidi, serta belanja langsung untuk proyek pembangunan, keduanya beradaptasi dengan perubahan prioritas daerah. Efektivitas dari kedua jenis belanja ini menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal dalam mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.

Penelitian ini mengilustrasikan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Indramayu selama satu dekade terakhir, yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan pembangunan. Ini menekankan pentingnya manajemen keuangan daerah yang tidak hanya mengejar target fiskal tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif serta berkelanjutan.

Efektivitas Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu

Analisis data PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Indramayu menunjukkan dinamika penting dalam pembangunan ekonomi daerah. PDRB, sebagai ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah tertentu, menjadi indikator utama efektivitas strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah. Berdasarkan data, PDRB Indramayu meningkat signifikan dari Rp 30.080,44 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 57.103,29 miliar pada 2023, mencerminkan kebijakan yang mendorong kapasitas produksi lokal dan diversifikasi ekonomi.

Namun, pertumbuhan LPE memperlihatkan ketidakstabilan, misalnya turun menjadi 3,19% pada 2017 setelah sebelumnya mencapai 5,65%. Fluktuasi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indramayu. Analisis juga menyoroti peran besar sektor migas dalam PDRB. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan, namun sekaligus menciptakan ketergantungan yang dapat membatasi diversifikasi ekonomi. Ketika harga migas global stabil atau meningkat, PDRB cenderung tinggi, tetapi sektor non-migas tidak selalu menunjukkan peningkatan yang sama.

Kebijakan pembangunan pemerintah daerah berfokus pada tantangan struktural seperti ketergantungan pada sektor pertanian dan migas (Suryahani et al., 2024). Program penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah (IKM) dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Namun, dampak program ini perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. Area lain yang penting termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan investasi asing, yang berpotensi mendorong pertumbuhan lebih jauh. Perbaikan infrastruktur transportasi dan logistik, misalnya, dapat membuka akses yang lebih luas dan menarik investasi baru bagi Indramayu.

Meski kemajuan telah dicapai dalam beberapa aspek, studi ini menekankan kebutuhan akan pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada sektor migas dinilai penting untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan stabil. Pengembangan kapasitas lokal melalui pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan infrastruktur yang merata, harus diintensifkan untuk mendukung rencana pembangunan daerah. Analisis ini tidak hanya menggambarkan situasi ekonomi saat ini, tetapi juga membuka wacana tentang strategi masa depan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Kabupaten Indramayu dalam konteks pembangunan nasional yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara kebijakan belanja daerah terhadap efektivitas PDRB dan LPE dalam mendorong pembangunan ekonomi Kabupaten Indramayu. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah berperan penting dalam mendukung peningkatan PDRB dan LPE di wilayah ini. Kebijakan belanja yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Indramayu terbukti berdampak positif signifikan

terhadap PDRB, terlihat dari tren peningkatan PDRB selama periode penelitian. Investasi yang difokuskan pada infrastruktur dasar serta dukungan untuk sektor-sektor produktif, seperti pertanian dan perikanan, berhasil memperkuat pondasi ekonomi lokal. Alokasi anggaran yang tepat dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan PDRB.

Meskipun LPE Kabupaten Indramayu masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat, pertumbuhannya menunjukkan stabilitas. Kebijakan belanja daerah yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik juga telah berhasil meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan fokus pada sektor kunci seperti infrastruktur dan pelayanan publik, kebijakan ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Temuan ini menekankan pentingnya alokasi anggaran yang strategis untuk meningkatkan output ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menunjukkan bahwa belanja daerah yang efektif dan efisien mampu meningkatkan PDRB dan LPE secara langsung. Penyusunan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan lokal menjadi faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah dalam mendukung pertumbuhan PDRB dan LPE di Kabupaten Indramayu. Pertama, pemerintah daerah sebaiknya tetap memprioritaskan investasi di sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi luas, seperti infrastruktur dan pendidikan. Investasi ini tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi juga memperkuat kapasitas produktif daerah dalam jangka panjang.

Kedua, pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor potensial baru, seperti pariwisata dan teknologi. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan memperluas basis ekonomi lokal, sehingga mampu meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap perubahan eksternal.

Ketiga, penting untuk memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan belanja daerah guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara tepat dan efisien sesuai dengan target. Sistem ini akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap perubahan ekonomi lokal.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Indramayu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan PDRB sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhudhori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113–124.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. routledge.

Pengaruh Kebijakan Belanja Daerah terhadap Efektivitas Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu

- Greene, W. (2001). Estimating econometric models with fixed effects. *Department of Economics, Stern School of Business, New York University*.
- Gujarati, D. N. (2003). *Data disk to accompany Basic Econometrics*.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Indonesia, R. (2004). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang. *Pemerintahan Daerah*.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Basri, F. H. (1999). *Ekonomi internasional: Teori dan kebijakan*.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69–79.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy 6-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225.
- Suryahani, I., Nurhayati, N., & Gunawan, E. R. S. (2024). *Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)